



Buletin Parlementaria

Nomor 999/III/III/2018 • Maret 2018

BPIH NAIK 0,9 PERSEN Pelayanan Harus Ditingkatkan



TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Polri Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada



Konferensi pers Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH Tahun 2018

Foto: Arif/oc

BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan

Kalangan DPR menekankan, meski Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2018 hanya naik 0,9 persen dibanding tahun lalu, namun pelayanan harus tetap ditingkatkan. Kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus menjadi prioritas, sehingga tingkat kepuasan jemaah makin meningkat.

Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan jajaran di Gedung DPR, Senin (12/3). Dalam acara pengesahan BPIH 2018 sebesar Rp35,235 juta atau naik 0,9 persen dibanding BPIH tahun 2017 lalu, sejumlah Anggota Komisi VIII menyampaikan tanggapannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (F-PKB) menilai, kesimpulan angka BPIH tersebut sebagai harga bersahabat. "Maka kata kuncinya, kami tetap mengejar pelayanan, sebagaimana disampaikan para Anggota Komisi VIII, peningkatan 0,9 persen jangan mengurangi pelayanan," ungkapnya.

Dengan penetapan BPIH lebih awal, dia berharap psikologi keterlambatan visa bisa dikurangi. "Sekalipun berangkat di hari-hari akhir, ada yang khawatir visa tidak keluar. Kami sepakat dan mendukung kepada Kemenag untuk segera melakukan persiapan optimal," jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi (F-PKS) menilai, kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu itu, sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi. Tetapi dia berharap, jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jemaah.

"Pelayanan harus menjadi prioritas

utama, sehingga kenaikan itu menjadi penyemangat untuk sama-sama meningkatkan ibadah haji, dan pada gilirannya angka kepuasan jemaah meningkat," tambahnya.

Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan) menyatakan, BPIH 2018 yang naik 0,9 persen itu adalah kerja keras Panja BPIH Komisi VIII dan Kemenag. Meski demikian dampak efisiensi di sisi transportasi jangan sampai mengurangi pelayanan ibadah haji di Mekkah. Justru perlindungan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi jemaah yang berisiko tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Bisri Romly (F-PKB) meminta perhatian Kemenag, agar bank-bank yang melayani jual beli riyal di lingkungan embarkasi, perlu ditertibkan. Karena bank-bank itu menjual riyal sampai Rp4.100, padahal kurs resmi hanya Rp3.570. Hal ini dinilai sangat merugikan jemaah haji. ■ (mp/sf)

Pemerintah Harus Siapkan Sistem Proteksi Instrumen Digital bagi Pekerja Migran

Disahkannya Undang - Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, maka pemerintah harus menyiapkan sistem proteksi yang berbasis instrument digital. Khususnya kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diwajibkan memasang *chip* pekerja migran.

Chip ini nantinya memungkinkan orang dengan fitur jelas, mengabarkan apa saja, tinggal ketik dan tekan tombol menyampaikan informasi. Misalnya soal kondisi pekerja migran di suatu tempat di Hongkong, kemudian Konjen Dubesnya bergerak. Hal-hal begini ini harus segera diimplementasikan di masa yang akan datang,” tandas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai memimpin Rapat Tim Pengawas TKI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut Pimpinan DPR Korkesra ini, Rapat Timwas TKI DPR RI akan menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. UU yang sudah disahkan tahun lalu tersebut juga merupakan hasil kerja Timwas, sehingga seluruh identifikasi terhadap masalah-masalah TKI sudah tercantum.

Timwas menurut Fahri, akan melacak pengawasan pelaksanaan UU, salah satunya melihat apakah sudah dibuat Peraturan Pemerintahnya, lalu institusi yang terkait itu apakah sudah menyesuaikan diri, baik Kemendagri, Kementerian Desa terkait KTP, *database* Dukcapil, Kemenlu, Kemenkum-HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi, terkait penyiapan tambahan pekerjaan yang diperlukan mengantisipasi UU.

“Karena ada unsur proteksi yang lebih kuat, maka nanti kepolisian dan kejaksaan juga akan ditanyakan kesiapannya menghadapi era baru perlindungan pekerja migran tersebut,” tambahnya.

Fahri berharap, setelah ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut pengesahan UU tersebut, seluruh pihak bisa bekerja lebih konkrit, termasuk menambah jumlah aparat penegak hukum di daerah-daerah yang banyak pekerja migrannya. Dengan demikian penanganan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran bisa diselesaikan lebih cepat.

Tak kalah penting, lanjut Fahri, adalah kesiapan dari institusi yang ada dalam menyambut pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran tersebut. Karena itu dalam waktu dekat, Timwas akan mengundang instansi terkait seperti Kemenaker dan BNPPTKI, terkait pelaksanaan program perlindungan TKI akan nasional.

“Dengan demikian, seluruh pekerja migran akan mengetahui hak-haknya dimana UU NO. 18 Tahun 2017 tersebut terdapat niat proteksi yang lebih tinggi, sehingga kalau terjadi kasus mereka akan mengetahui jalan keluarnya,” tandas politisi dapil NTB itu. ■ (mp/sf)



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,
Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Mustaqim, S.Kom.I

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara laporan tahunan KPK 2017

Ketua DPR RI Perbaiki Hubungan dengan KPK

Hubungan dua lembaga, DPR RI dengan KPK yang kerap tak harmonis, ingin coba diperbaiki oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Hubungan keduanya sempat memanas ketika DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK. Pasca selesainya kerja Pansus, hubungan kelembagaan harus terjalin baik.

Hubungan dua lembaga, DPR RI dengan KPK yang kerap tak harmonis, ingin coba diperbaiki oleh Ketua DPR RI Bambang

Soesatyo. Hubungan keduanya sempat memanas ketika DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK. Pasca selesainya kerja Pansus, hubungan kelembagaan harus

terjalin baik.

Bamsuet, begitu Ketua DPR akrab disapa, menilai bahwa KPK saat ini sudah menunjukkan kemajuan kinerja, sehingga perlu diapresiasi. Sebelumnya, DPR sudah memberikan kritik bahkan Pansus KPK juga memberikan rekomendasi perbaikan internal KPK. Pola hubungan yang sempat memanas perlu diharmonisasi kembali.

“Kita sudah melihat banyak kemajuan yang dilakukan KPK dan harus dipertahankan. Kerugian negara bisa ditekan semaksimal mungkin,” ucap Bamsuet saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3). Bamsuet sendiri hadir ke KPK untuk menghadiri

Indonesia – Kazakhstan Sepakat Tingkatkan Hubungan Ekonomi

Hubungan ekonomi menjadi salah satu isu penting dalam kunjungan kenegaraan Ketua Senat Parlemen Republik Kazakhstan ke Indonesia. DPR RI dan Senat Parlemen Kazakhstan sepakat untuk terus meningkatkan potensi ekonomi kedua negara.



Pertemuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Senat Parlemen Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev

Foto: jaka/od

Demikian mengemuka dalam Pertemuan Bilateral Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Senat Parlemen Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengatakan, volume perdagangan Indonesia – Kazakhstan cukup baik, setidaknya Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan kedua negara mencapai US\$ 52,92 juta. Menurutnya, hubungan yang baik ini perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Indonesia – Kazakhstan memiliki beberapa persamaan, antara lain sumber daya alam yang melimpah, memiliki penduduk mayoritas muslim moderat yang memastikan keragaman yang harmonis serta komitmen terhadap HAM dan demokrasi.

“Kassym juga menyampaikan bahwa negaranya sama dengan kita sedang membangun demokrasi dan membangun ekonomi. Hanya memang ada beberapa kendala terkait jauhnya jarak kita dan masalah transportasi. Ini akan menjadi pemikiran kita bersama agar hubungan perdagangan bisa tetap lancar,” papar politisi dari F-Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Senat Parlemen Republik Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev mengatakan Indonesia adalah

mitra penting Kazakhstan di negara Asia Tenggara. Sebagai negara yang tergabung dalam kelompok ekonomi utama atau G-20, ia menyakini banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama Indonesia. Tidak hanya ekonomi tetapi juga isu politik dan pertukaran informasi.

“Pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Indonesia berlangsung sangat kooperatif. Kami percaya bahwa kami memiliki potensi besar kerjasama baik di parlemen maupun pemerintahan. Dalam kemitraan parlemen, kami sepakat untuk semakin mempererat hubungan secara bilateral maupun di organisasi internasional seperti IPU,” ucap Kassym.

Dalam kesempatan itu, Kassym juga mengatakan tujuannya ke Jakarta adalah untuk mengundang Presiden Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan ke Astana pada Oktober mendatang. “Tahun ini, kita menandai perayaan 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan,” sambung Tokayev.

Turut mendampingi Bamsoet, Pimpinan DPR RI Fadli Zon dan Agus Hermanto, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, beserta Anggota BKSAP Dave Akbarshah Fikarno dan Amelia Anggraini. Sebelumnya, Delegasi Parlemen Kazakhstan telah diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (13/3) pagi. ■ (ann/sf)



Foto: jayadi/od

acara laporan tahunan KPK 2017 bersama pejabat negara lainnya. Hadir pula Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir dan dua anggota Komisi III Arteria Dahlan dan Abu Bakar Al Habsyi.

Pola hubungan DPR-KPK pasca kepemimpinan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Pansus Angket KPK, sudah menunjukkan perbaikan yang berarti. Terakhir, DPR sendiri sudah membuka Klinik e-LHKPN yang dihadiri langsung Ketua KPK Agus Raharjo. Klinik ini untuk memudahkan akses pelaporan harta kekayaan bagi 560 anggota DPR yang bisa dipantau oleh KPK dan publik. ■ (mh/sc)

TNI AD Diminta Evaluasi Kecelakaan Tank di Purworejo

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, harus ada evaluasi terhadap tergelincir dan tenggelamnya lapis baja (tank) M113 milik TNI AD di Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (10/3) yang menyebabkan dua korban jiwa.



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon

Foto: Jaka/od

“ Saya melihat harus ada evaluasi mengenai kejadian ini. Dan harus ada klarifikasi dan penjelasan dari TNI AD, kenapa kegiatan

tersebut menggunakan tank TNI untuk kegiatan outbond anak-anak di bawah umur,” ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Ia juga akan meminta Panglima TNI melalui Komisi I DPR, untuk memberikan penjelasan penggunaan Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) untuk wisata yang tidak sesuai dengan peruntukkan sebenarnya, serta melakukan uji kelayakan secara berkala terhadap seluruh alutsista yang ada. “Kalau untuk wisata, saya kira itu kurang tepat. Apalagi untuk anak-anak, kita akan meminta penjelasan dari TNI lewat Komisi terkait,” ujarnya.

Fadli juga menilai kegiatan outbond anak-anak Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang melintasi sungai menggunakan tank sangat beresiko dan kurang bijak. “Tentu kita memahami niat baik dari TNI kita untuk outbond dengan anak-anak, namun melihat anak-anak kecil

yang masih di bawah umur menaiki tank, saya kira ini kurang bijak,” nilai Fadli.

Politisi F-Gerindra ini menambahkan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sekalipun itu berbentuk outbond harus mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan. “Saya kira harus dipertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan serta menjadi skala prioritas untuk anak-anak,” imbuhnya.

Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan itu berawal saat Yon 412 melaksanakan latihan outbond bersama puluhan peserta dari PAUD dan TK menggunakan tank di Sungai Bogowonto, Jateng, sekitar pukul 10:05 WIB, Sabtu (10/3). Para peserta terdiri atas TK Ananda 6 anak dan seorang guru, TK Masitoh 71 anak dan 4 guru. TK Siwi 20 anak dan 2 guru, PAUD Lestari 20 anak dengan empat guru, serta PAUD Handayani dengan 35 anak.

Pada pelatihan outbond itu melibatkan tiga armada tempur lapis baja milik TNI tersebut. Para peserta dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama, tank mampu melintas dengan selamat, namun saat tank kedua menyisir sungai, tanah diduga ambles sehingga tank terperosok dan masuk ke sungai yang cukup dalam.

Atas kejadian itu, dua korban diinformasikan meninggal dunia, atas nama Pratu Rendy dan Kepala TK Ananda, Iswandari. Sementara seorang siswa bernama Hafitz masih dilakukan pencarian. ■ (mhr/sf)

Indonesia Perlu Miliki UU Penelitian

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai perlu adanya Undang-Undang Penelitian di Indonesia. Harapannya, dengan adanya UU itu, dapat memberikan payung hukum untuk peningkatan anggaran dana penelitian. Karena selama ini dana penelitian Indonesia masih sangat kecil dibanding negara - negara lain di dunia.

“ Rata - rata dana penelitian tanah air itu hanya 0,02 persen per tahun, angka ini relatif kecil jika dibanding negara lain yang telah mencapai 2 persen,” kata Sutan, usai mendampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Forum Nasional Profesor Riset di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Sutan menilai, akibat kecilnya dana penelitian ini, dunia riset di Tanah Air sulit untuk berkembang. Bahkan, penelitian belum begitu tampak kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Imbasnya, pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang besar, tidak optimal dalam menyejahterakan rakyat.

“Lemahnya riset ini juga membuat

Lemahnya riset ini juga membuat ketergantungan Indonesia akan teknologi negara maju begitu besar. Sumber daya kita yang melimpah, lebih besar manfaatnya bagi pihak lain yang menguasai teknologi



Perlu Pengawasan Mendalam Terhadap Otsus Papua

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu adanya pemantauan dan pengawasan secara mendalam mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Fadli memastikan, DPR melalui Tim Pemantau Otsus Papua juga memantau dan mengawasi berbagai masalah yang terjadi di sana.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa permasalahan Otsus Papua merupakan masalah bersama, dan harus dihadapi semua kalangan masyarakat.

“Permasalahan ini tidak hanya jadi masalah pemerintah, namun menjadi masalah DPR dan masyarakat juga. Kita semua harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini,” imbuh politisi F-PD itu.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Senin (5/3) lalu, telah

“ Kami menerima aspirasi-aspirasi tentang masalah yang terjadi, dan tentu saja kami akan berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dan

menciptakan kondisi yang kondusif di Papua,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Politisi F- Gerindra itu menambahkan, akibat dari penyalahgunaan dana Otsus Papua ini mengakibatkan pembangunan yang terjadi di Papua tidak merata.

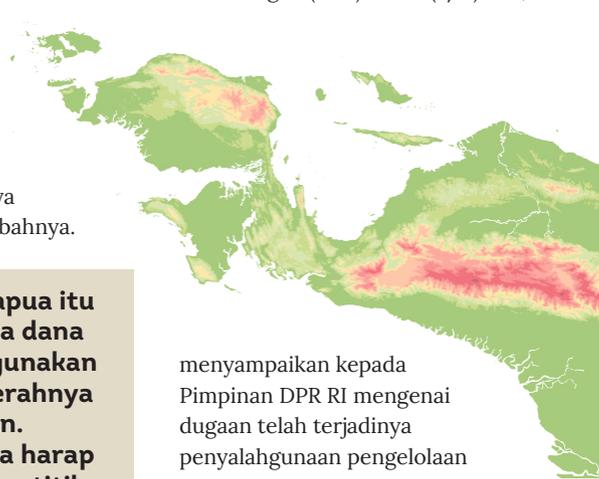
“Perkembangan di Papua itu tidak merata karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Oleh karena itu, saya harap hal ini segera ketemu titik terangnya, supaya Papua menjadi kondusif,” tambahnya.



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon

Foto: Jaka/od

Perkembangan di Papua itu tidak merata karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Oleh karena itu, saya harap hal ini segera ketemu titik terangnya, supaya Papua menjadi kondusif



menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI mengenai dugaan telah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus daerah Papua dari tahun 2011 hingga 2017. ■ (ila/sf)

ketergantungan Indonesia akan teknologi negara maju begitu besar. Sumber daya kita yang melimpah, lebih besar manfaatnya bagi pihak lain yang menguasai teknologi,” nilai politisi F-Gerindra itu.

Sutan menambahkan, DPR akan mengambil langkah untuk mengusulkan RUU Penelitian dalam masa sidang ke depan. Menurutnya secara prinsip, penelitian menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan suatu negara.

“Kita ketahui, UU Pendidikan, UU Perbukuan, UU Kebudayaan dan UU Penelitian di banyak negara menjadi tiang penyangga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tandas politisi dapil Jambi itu. ■ (tn/sf)



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menerima Forum Nasional Profesor Riset

Foto:Rumi/od



Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan saling tukar menukar cenderamata dengan Wakil Ketua Parlemen Yunani Anatasia (Tasia) Christodouloupoulou

Hubungan Kerja Sama Indonesia - Yunani Diharapkan Meningkatkan

Peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Yunani menjadi salah satu pembahasan antara Delegasi DPR RI saat melakukan kunjungan bilateral ke Parlemen Yunani. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Yunani menjajaki kerja sama dari sisi ekonomi hingga industri perkapalan.



foto: iwan/od

Kunjungan bilateral DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan diterima langsung oleh Wakil Ketua Parlemen Yunani Anastasia (Tasia) Christodouloupolou beserta beberapa Anggota Parlemen Yunani lainnya, baru-baru ini. Dalam kunjungan yang diikuti sejumlah anggota dewan lintas komisi dan fraksi itu, Delegasi DPR RI juga didampingi Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Ferry

Adamhar.

“Hubungan perdagangan kedua negara berpotensi sangat besar untuk meningkat lagi, dengan kerja sama saluran distribusi produk dalam negeri. Di mana Indonesia menjadi pintu gerbang pasar produk Yunani ke ASEAN, dan Yunani menjadi pintu gerbang pasar produk Indonesia ke Eropa Selatan serta tren positif sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian Yunani,” kata Taufik saat memberikan sambutan dalam pertemuan.

Dari sisi ekonomi, tren perdagangan antara Indonesia dan Yunani selama 6 tahun terakhir, menurut Taufik mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka perdagangan mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu dari USD 210 juta menjadi USD 280 juta.

“Saat ini, Indonesia mengeksport minyak kelapa sawit, kertas, sepatu, tembakau, kopi serta berbagai komoditas lain ke Yunani. Sementara Yunani mengeksport produk kapas, tinta, kacang, buah kiwi, dan berbagai komoditas lain ke Indonesia,” papar Taufik.

Taufik juga mengatakan, hubungan kerja sama Indonesia dan Yunani berpotensi untuk meningkat lagi. Apalagi saat ini Indonesia tengah gencar untuk memperbanyak infrastruktur pelabuhan dan membangun poros maritim yang kuat. Sementara, kata Taufik, Yunani yang juga negara maritim, dapat dijadikan mitra dagang utama di wilayah Eropa Selatan.

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ini pun memastikan, kerja sama saling mendukung antara Indonesia dan Yunani juga terjalin semakin erat. Ini ditandai dengan dukungan Yunani terhadap Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, dan beberapa Organisasi Internasional lainnya. Sebaliknya Indonesia pun akan mendukung Yunani untuk menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB pada tahun 2025-2026.

“Selain itu, Indonesian-Greece *Friendship Group* (GKSB) telah terbentuk, saya harap dengan dibentuknya *Friendship Group* ini dapat meningkatkan kerja sama antar parlemen kedua negara,” ungkap politisi F-PAN itu.

Di akhir pertemuan, Taufik menyambut baik apabila ada kunjungan balasan dari Parlemen Yunani ke Indonesia. Mengingat hubungan antar parlemen kedua negara perlu dijaga dan diperkuat. Ia pun berharap kerja sama bilateral Indonesia-Yunani semakin meningkat. Selain itu, juga agar ada



Tren perdagangan antara Indonesia dan Yunani selama 6 tahun terakhir, menurut Taufik mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka perdagangan mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu dari USD 210 juta menjadi USD 280 juta

angin segar bagi kerja sama pendidikan, perdagangan, infrastruktur dan industri kreatif kedua negara.

“Pertemuan ini kami harap dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Yunani, mengingat DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia melalui fungsi Diplomasi Parlemen,” tutup politisi dapil Jateng itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Parlemen Yunani Anastasia (Tasia) Christodouloupolou menyampaikan beberapa hal terkait kondisi Yunani. Salah satunya terkait kondisi perekonomian dalam negeri Yunani yang sudah hampir 10 tahun tidak terlalu kondusif. Ia berharap, pada Agustus tahun 2018 ini, kondisi perekonomian semakin membaik.

“Kita akan memulai dengan lembaran yang baru. Namun permasalahan ini tidak sampai di situ. Setelah itu, mungkin keadaan ekonomi sudah membaik namun ternyata tantangan-tantangan dalam negeri pun masih banyak muncul dari pihak-pihak oposisi, yang semakin hari juga semakin lebar ketidaksepahaman dengan pemerintah. Dan saya cuma berharap mudah-mudahan PR kita yang besar ini akan segera bisa berakhir,” ungkap Anastasia.

Anastasia pun ingin mengetahui mengenai hubungan parlemen dengan masyarakat, termasuk mengenai keberagaman agama di Indonesia. Karena menurutnya, Indonesia merupakan negara yang beragam agama dan suku. Pertemuan pun diakhiri dengan pertukaran cenderamata oleh kedua belah pihak dan tur gedung Parlemen Yunani. ■ (iv/sf)

DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi sangat prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

“Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, dan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah sangat memprihatinkan,” ujar Yoga, begitu ia biasa disapa, di sela-sela RDP Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog dan jajarannya di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/3).

Yoga menjelaskan, berdasarkan paparan Dirut Bulog dalam RDP tersebut bahwa per 12 Maret 2018 cadangan beras pemerintah minus 27.888 ton. Dengan kata lain, pemerintah utang beras Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton. Padahal sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras. Yoga mempertanyakan, dimana letak beras tersebut, apakah masih tersebar di petani dan masyarakat, pedagang atau pengusaha beras, atau di Bulog.

“Ini sangat parah, masak cadangan beras pemerintah tidak ada. Idealnya cadangan beras pemerintah diputuskan dalam pembahasan RAPBN. Jika dikatakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia surplus beras. Lalu pertanyaannya, beras tersebut posisinya ada dimana. Saya melihat Bulog dihadapkan pada posisi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga dipasaran,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut politisi

Fraksi PAN ini, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, HPP bagi Bulog dalam membeli gabah kering panen adalah sebesar Rp 3700 per kilogramnya, gabah kering giling Rp 4600, sedangkan harga beras medium sebesar Rp 7300. Harga tersebut jauh dibawah harga pasaran. Hal itu membuat petani atau masyarakat lebih memilih menjual ke pasaran dibanding ke Bulog. Sehingga dikatakan Yoga, Bulog tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah atau beras, sementara pemerintah pun belum mau merevisi HPP.

“Dengan kata lain, problemnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan, karena situasi dan kondisi di lapangan yang menyebabkan Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan. Hal tersebutlah yang membuat cadangan beras pemerintah minus. Ini sangat memprihatinkan. Ini situasi darurat pangan. Kasihan, Bulog dibuat tidak berdaya,”tegas Yoga.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR mendesak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam mengatasi permasalahan itu. Terlebih lagi, dalam waktu beberapa bulan lagi, akan masuk bulan Ramadhan dimana kebutuhan atau permintaan beras atau pangan pun akan semakin meningkat. Selain itu, Komisi IV DPR juga mendesak pembentukan Lembaga Pangan Nasional sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan. ■ (ayu/sf)

Pembentukan *Holding* Migas Perlu Keterlibatan DPR

Rencana pembentukan *holding* migas dalam tubuh BUMN masih menyisakan banyak permasalahan hukum. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir beranggapan, proses pembentukan *holding* migas perlu melibatkan DPR, sebagai tanggung jawab tugas legislasi dan pengawasan pada setiap perubahan aset yang menyangkut kekayaan negara. Ia pun mengungkapkan rencana pembentukan *holding* migas terlalu terburu-buru.

“PP No 6 Tahun 2018 tentang *holding* migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29 persen pemegang saham PGN belum menyetujui *holding* tersebut,” papar

politisi dari Fraksi Partai Hanura ini dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Senin (12/3).

Pembentukan *holding* migas ini akan memberikan peran dominan untuk PT. Pertamina, sedangkan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai dasar dari penghasil

gas diperkirakan tidak optimal. Aspek lain yang bisa menimbulkan masalah adalah potensi konflik kepentingan dalam tubuh *holding* migas itu nantinya. Sebab, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih

Komisi VII Dorong Terobosan Tingkatkan *Lifting* Migas PT. Bumi Siak Pusako

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendorong adanya terobosan baru terkait permasalahan *lifting* minyak bumi dan gas (migas) yang terus menurun di PT. Bumi Siak Pusako, Provinsi Riau. Ia mengakui, fakta di lapangan *lifting* yang terus menurun merupakan ciri dari sektor migas.

Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, Direktur Hulu Energi PT. Pertamina (Persero), Dirut PT. Pertamina Hulu Energi, Kepala SKK Migas, Dinas ESDM Prov. Riau beserta jajarannya di Kantor Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu Energi Riau, Riau, Selasa (13/3).

“Faktanya, *lifting* yang terus menurun merupakan ciri dari sektor migas. Namun sayangnya, hal itu kurang didukung dengan tidak adanya investasi untuk menemukan sumber-sumber sumur baru yang hasilnya masih murni dan bisa untuk diambil,” ucap Gus Irawan.

Politisi F-Gerindra ini menyebutkan, seharusnya pemerintah bisa fokus untuk melakukan investasi di sektor migas tersebut, karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sumber daya migas



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

Foto: ilia/od

migas.

“Lingkungan kita jaga, konservasi ekosistem juga kita dukung, tetapi jangan sampai potensi sumber daya alam yang ada di situ, tidak bisa ditelusuri dan dieksploitasi. Karena kan sumber daya ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak,” tutup politisi dapil Sumut itu. ■ (ilia/sf)



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir

Foto: Andri/od

mengantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor.

Sedangkan, gas bumi yang sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia yang merupakan inti bisnis PT. PGN, belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Inas juga mengatakan, potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan *holding* migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29 persen.

Masalah lain yang diungkapkan Inas yakni rencana pembentukan *holding* migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan Undang-Undang BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh

Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding. Dengan demikian, kebijakan *holding* tidak memberikan kepastian hukum.

Selain itu, masih adanya perbedaan konsep *holding* BUMN migas dengan konsep kelembagaan yang sedang dibahas dalam Revisi UU Minyak dan Gas Bumi oleh DPR, akan berpotensi menimbulkan konflik juga. Rencana pembentukan *holding* BUMN migas tanpa menunggu arah dari Revisi Undang-Undang Migas, dapat menyebabkan inefisiensi nasional karena diperlukan penyesuaian kelembagaan yang cukup rumit. ■ (eko/sf)

PLTU Batang Berpotensi Polusi Merkuri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menilai harus ada penelitian lebih lanjut dan menjadikan rujukan temuan Greenpeace bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon (lebih dari seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh Myanmar di tahun 2009) dan 226 kg merkuri setiap tahunnya.



Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Batang

Foto: Mahir/od

Ini yang perlu mendapatkan tindak lanjut, jangan sampai apa yang disinyalir oleh Greenpeace menjadi kenyataan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata tahun 2017 yang tidak mengizinkan adanya cemaran merkuri dalam aktivitas industri terutama pertambangan atau juga industri yang menggunakan hasil tambang seperti batubara yang dipakai PLTU Batang ini,” ujar Yudha saat melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (14/3).

Politisi F-Golkar ini menjelaskan bahwa pembangkit listrik yang berbasis batubara mempunyai resiko kandungan emisi karbon yang besar dan hal ini yang harus menjadi perhatian utama yakni dari aspek lingkungan. “Banyak aspek lingkungan yang harus dilihat. Termasuk debu atau *fly ash* yang muncul akibat tertimbunnya batubara selama dalam

posisi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas *loading* ini bisa menimbulkan debu, dibawa angin dan bisa menimbulkan pencemaran udara,” jelas Yudha.

Yudha melanjutkan, untuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diakibatkan oleh PLTU Batang ini dalam implementasinya dibutuhkan pengawasan salah satunya yang berbentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Mereka tentu sudah menyampaikan AMDAL nya terlebih dahulu, karena ini proyek 2x1.000 MW. Tetapi untuk implementasi AMDAL nya sendiri perlu pengawasan, pengawasan itu bisa berbentuk dikeluarkannya UKL dan UPL. Karena UKL dan UPL itulah yang nantinya melihat bagaimana konsistensi apa yang telah disepakati dalam AMDAL tersebut,” imbuhnya.

Yudha mengajak kepada semua pihak

yang terlibat untuk tetap mengawasi dari waktu ke waktu pengerjaan proyek PLTU Batang ini karena menurutnya keberadaan pembangkit listrik dan upaya “melistriki” masyarakat menjadi tanggungjawab negara. “Tentunya dengan kapasitas yang sangat besar ini bisa melistriki masyarakat dan industri serta pasti akan menimbulkan dorongan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional,” harap pria dapil Jawa Timur IX ini.

Proyek PLTU Batang ini dengan kapasitas 2x1.000 MW yang dikerjakan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) pada Juni 2016 lalu mencapai kesepakatan pembiayaan (*financial close*). BPI merupakan konsorsium dari Electric Power Development Co.Ltd (J-Power), PT Adaro Power (AP), Itochu Corporation (Itochu). Proyek PLTU dengan investasi proyek US\$ 4.2 miliar dan menggunakan lahan 226 hektar ini ditargetkan selesai dan mampu beroperasi untuk komersial pada 2020 mendatang. ■ (mhr/sc)



BKSAP DPR RI bersama Delegasi Parlemen Iran

Foto: Oqij/od

Indonesia Bisa Tingkatkan Kerja Sama Migas dengan Iran

Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad berharap Indonesia dapat lebih meningkatkan kerja sama di bidang Migas (minyak dan gas) dengan Iran. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Iran di Lounge Gedung Nusantara III, Lantai II, Senayan, Jakarta, Kamis (08/3).

“ Saat ini memang sudah terjalin kerja sama antara Indonesia dengan Iran termasuk di bidang migas (minyak dan gas bumi). Salah satunya dengan pembelian Elpiji dan gas dari Iran. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan masuk ke Iran. Dengan total transaksi tidak lebih dari 300 juta USD. Namun sebenarnya hal tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi, potensinya bisa lebih dari 2-3 miliar USD per tahunnya,” ujar Fadel.

Bahkan dilanjutkannya, saat ia bersama Menko Ekonomi serta Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Indonesia mengunjungi Iran beberapa waktu lalu, sempat dikatakan Menteri Ekonomi bahwa Iran merupakan pasar baru, pasar yang cukup potensial bagi Indonesia.

Sayangnya, hal tersebut belum dilaksanakan seutuhnya oleh pemerintah Indonesia. Presiden masih khawatir dengan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran. Sehingga seluruh transaksi ke Iran, terlebih dahulu

harus melalui Dubai atau Turki.

“Pemerintah sudah mensiasati dengan bank-bank yang ada di Indonesia, seperti BJB (Bank Jawa Barat-red) dan beberapa bank yang ada lainnya. Sementara Bank Indonesia dan OJK (otoritas jasa keuangan) belum berani mengambil langkah. Kondisi inilah yang membuat Indonesia sulit meningkatkan kerja sama dengan Iran, meskipun Iran menjadi market baru untuk Indonesia,” paparnya.

Hal berbeda justru terjadi pada negara tetangga Indonesia yakni Malaysia dan Thailand. Transaksi bisnis kedua negara tetangga Indonesia itu dengan Iran jauh di atas Indonesia. Bahkan kedua negara tersebut sudah mampu membuka *direct flight* (penerbangan langsung) dari negaranya ke Teheran (Iran). Sementara Indonesia belum ada penerbangan langsung ke Iran.

Melihat kondisi demikian, Delegasi Parlemen Iran yang dipimpin Mahmoud Sadeghi berharap agar Indonesia mau meningkatkan hubungan kerja sama

dengan negaranya. Tidak hanya di sektor migas, melainkan juga di sektor pariwisata. Salah satunya dengan membuka penerbangan langsung dari Indonesia ke Teheran. Dengan demikian akan banyak wisatawan dari Indonesia yang mengunjungi negara tersebut, misalnya dengan memasukkan kunjungan ke Teheran dalam rangkaian perjalanan ibadah umroh. ■ (ayu/sc)

Pemerintah sudah mensiasati dengan bank-bank yang ada di Indonesia, seperti BJB dan beberapa bank yang ada lainnya. Sementara Bank Indonesia dan OJK belum berani mengambil langkah.



foto: nt/od

Tim BURT saat meninjau fasilitas Bali Royal Hospital

BURT DPR Apresiasi RS Bali Royal Layani Pasien Jamkestama

Ketua BURT DPR RI Capt. Anton Sihombing di Bali, Selasa (13/3) mengapresiasi rumah sakit Bali Royal Hospital (Bros) dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama).

“ Kita lihat Bali Royal Hospital sudah tertata dengan baik, jadi nama-nama anggota DPR dan keluarganya sudah tersimpan, sehingga tidak perlu mengkonfirmasi atau menunjukkan kartu

anggota atau kartu Jasindo,” kata Anton kepada Parlementaria usai berdiskusi dan meninjau sejumlah fasilitas Bali Royal Hospital.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua

BURT Novita Wijayanti, menurutnya fasilitas Bali Royal Hospital sudah layak dan memenuhi kriteria rumah sakit yang menjadi rujukan rekanan Jamkestama. “Kamarnya dan juga

pelayanan di front office, karyawan-karyawannya sudah mengetahui bagaimana mereka harus melayani para anggota dewan dan keluarganya,” jelas Novita.

Bahkan, lanjut Novita, kedatangan BURT DPR tidak hanya menanyakan fasilitas kesehatan yang didapat oleh pejabat negara, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. “Jadi harapan kami apa yang sudah dilakukan minimal seperti ini, dan kemudian bisa ditingkatkan sehingga rumah sakit ini juga bisa terus bekerja sama dengan Jamkestama,” harapnya.

Berkaitan dengan permasalahan *database* peserta Jamkestama, politisi Gerindra ini mengingatkan agar PT. Jasindo selaku pengelola Jamkestama, untuk selalu memberikan pengarahannya kepada rumah sakit yang menjadi *provider* untuk memiliki *database*. “Jadi pada saat anggota yang umpamanya tidak membawa kartu pun, dia lihat, dicek namanya atau kartu tanda anggota nya itu sudah ada,” terangnya.

“Kemudian juga Jasindo memberikan arahan-arahan bagaimana semestinya bekerja sama itu,” harapnya.

Sementara Anggota BURT Rendy Lamadjido mengatakan, ia mengapresiasi pelayanan optimal untuk VVIP dari rumah sakit ini. “Cukup bagus pelayanannya dan rumah sakitnya bersih dan menurut saya siap dengan situasi dan kondisi,” jelasnya. Namun ia pun menyarankan masih perlu ada peralatan yang harus dilengkapi terutama peralatan-peralatan penyakit yang mematikan seperti jantung dan lain-lain.

Diketahui, padatnya kegiatan DPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan anggota dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yang ada. Hal ini berimplikasi perlunya anggota dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan dan ketentuan. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 65/2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara. Dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya itu dilaksanakan oleh PT Jasindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Permenkeu No. 167/PMK.02/2014 dan Permenkes No. 55/2014.

■ (nt/sc)

Fungsi dan Kewenangan BNN Jadi Pembahasan Panja RUU Narkotika

Dalam Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani menanyakan fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ke depan.



Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani

Foto Azka/od



“BNN dalam konteks penguatan, sebagai *leading agency*, *leading sector* untuk narkotika dan psikotropika, apakah posisinya seperti sekarang, atau menjadi lembaga pencegahan dan rehabilitasi saja, atau juga bisa mencegah dan menindak?” tanya Arsul di ruang rapat Baleg Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pertanyaan tersebut muncul karena selama ini penindakan masih terjadi di dua institusi. BNN punya kewenangan

penindakan, tapi Direktorat Narkotika di Bareskrim Polri juga melakukan penindakan.

Arsul yang juga anggota Komisi III DPR ini berpendapat, selama ini antara dua lembaga penegak hukum ini terjadi kompetisi, karena ini menyangkut gengsi kelembagaan. “Kalau yang kami lihat di Komisi III dalam beberapa hal realitasnya terjadi kompetisi,” ungkapinya.

“Ini harus menjadi bahan-bahan kita, pilihan-pilihan apa yang terkait dengan posisi kelembagaan BNN ini ke depan,” imbuh Arsul. ■ (eko/sc)

BNN punya kewenangan penindakan, tapi Direktorat Narkotika di Bareskrim Polri juga melakukan penindakan

Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait *Holding* BUMN

Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait skema rencana *holding* perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan *holding* BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

“Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana *holding* . Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN,” tutur Melchias, melalui rilis yang diterima oleh Parlementaria, Selasa (13/3).

Maka dari itu, politisi Golkar ini merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan *holding* BUMN. “Kami mau tahu apa dasar pembentukan *holding* . Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?” ujarnya

Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk *holding* . Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani



Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng

Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI. ■ (hs/sf)

Sareh Wiyono Minta MenPAN-RB Perhatikan Nasib Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memperhatikan nasib tenaga honorer K1 yang tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal sudah mengabdikan lebih dari 25 tahun.

“Tidak juga diangkat tenaga honorer K1 ini menjadi ganjalan bagi kami, maka dari itu kami minta MenPAN-RB bisa menyelesaikan permasalahan ini, setidaknya beri kepastian kepada mereka,” ungkap Sareh di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

Pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan nasib tenaga honorer K1, dengan hanya memikirkan cara merealisasikan nasib tenaga honorer K2. “Pemerintah saat ini harus memikirkan bagaimana merealisasi nasib tenaga honorer K2, tanpa mempertimbangkan penyelesaian nasib tenaga honorer K1. Saya harap tenaga honorer K1 bagaimanapun harus diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Dia mencontohkan, tenaga honorer

K1 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ada 178 ribu yang terkatung-katung. Padahal pemerintah sudah menjanjikan pengangkatan pada 16 Oktober 2016 lalu. Namun, terkendala dengan kepala daerah yang tidak mau menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk para tenaga honorer.

“Sebenarnya kalau kepala daerah tidak mengeluarkan, itu merupakan pelanggaran karena tenaga honorer ini digaji dari APBD. Inilah yang pemerintah perlu turun tangan. Banyak honorer yang belum diangkat dan tidak menjadi perhatian,



Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono

Pemerintah saat ini memikirkan bagaimana merealisasi nasib tenaga honorer K2, tanpa mempertimbangkan penyelesaian nasib tenaga honorer K1. Saya harap tenaga honorer K1 bagaimanapun harus diangkat menjadi PNS

seperti guru yang hanya digaji Rp 100 per bulan. Kami mohon ini menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ace meminta kejelasan kepada pemerintah mengenai nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum juga diangkat.

“Di sejumlah daerah, masih banyak yang mempertanyakan nasib tenaga honorer K1 dan K2 yang belum jelas nasib

kepegawaianya. Namun KemenPAN-RB dan Pemerintah Daerah malah melakukan rekrutmen terhadap CPNS. Makanya kami mempertanyakan kebijakan tersebut,” ungkap Ace.

Sementara itu, MenPAN-RB Asman Abnur meminta waktu untuk melakukan investigasi data terhadap 439 ribu honorer kategori 2 (K2). Investigasi itu untuk proses validasi, guna memastikan asli tidaknya mereka sebagai honorer K2.

“Sebanyak 439 ribu honorer K2 ini sebenarnya tidak lulus test CPNS 2013. Nah, sekarang minta diangkat karena sudah lama mengabdikan. Akan kami bereskan itu, tapi dimulai dari validasi data dulu. Dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kompetensi, serta disesuaikan kebutuhan dengan mengedepankan integritas moral dan sesuai UU yang berlaku,” ungkapnya. ■ (mm/sf)

Bandara Binaka Segera Jadi Bandara Internasional

Bandara Binaka di Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, segera diproyeksikan menjadi bandara internasional. Pengembangan bandara sedang dilakukan oleh pemda setempat dan Kementerian Perhubungan. Pengembangan bandara ini dilakukan, karena Pulau Nias dijadikan destinasi wisata nasional oleh pemerintah.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi V DPR RI dengan Bupati Nias Barat dan otoritas Bandara Binaka, Kamis (15/3) di Bandara Binaka. Bupati Nias Barat kepada Tim Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, mengungkapkan sudah ada MoU 24 Oktober 2014 lalu antara pemda setempat dengan Kemenhub untuk pengembangan bandara.

Setiap tahun ada pengerjaan perpanjangan bandara sepanjang 200 meter. Dan rencananya bandara ini akan diperpanjang sampai 2250 meter dengan lebar 45 meter. “Nias memang mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah pusat dan DPR. Pembangunan bandara ini mendapat prioritas, termasuk pembangunan infrastrukturnya,” ucap Fary dalam sambutannya pada pertemuan tersebut.

Saat ini, untuk menuju Nias, pesawat

dari Jakarta harus transit dahulu di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Kelak, penerbangan dari Jakarta bisa langsung ke Nias. Otoritas Bandara Binaka menjelaskan, selama ini pesawat yang beroperasi masih pesawat OTR dan perintis. Diproyeksikan pesawat-pesawat berbadan besar bisa mendarat di bandara ini untuk menunjang kunjungan wisata ke Nias. ■ (mh/sc)

Fasilitas RS Grha Medika Lombok Sesuai Kriteria Jamkestama

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai, Rumah Sakit (RS) Grha Medika Lombok sudah sesuai dengan kriteria dalam melayani peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkestama).



Foto: Tiara/cod

Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti memberikan cenderamata kepada Direksi RS Grha Medika Lombok

“Meskipun RS Grha Medika Lombok masih terbilang baru, dan masih dalam proses pengembangan, namun RS ini sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama,” ungkap Novita, usai memimpin pertemuan Tim BURT DPR RI dengan Direksi RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3).

Pemenuhan kriteria tersebut menurut Politisi F-Gerindra itu didasarkan pada sudah tersedianya alat medis dengan kondisi baik, serta jumlah dokter yang memadai bagi Anggota DPR maupun Keluarga dan Pejabat lainnya, yang ingin memeriksakan kesehatannya.

“Untuk itu ke depannya, harapan saya pelayanan yang diberikan tidak hanya baik untuk para Anggota maupun Pejabat, tapi juga ke masyarakat. Kami juga mendukung pemenuhan terhadap fasilitas yang diberikan, tidak ada diskriminasi, baik untuk peserta BPJS maupun non BPJS, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” harap politisi Dapil Jawa Tengah itu.

Senada dengan Novita, Anggota BURT DPR RI Gatot Sudjito menambahkan, pelayanan RS dinilai sudah baik, namun tetap harus diimbangi dengan perbaikan kedepannya.

“Memang secara perspektif, kesiapan fasilitas dan dokternya bagus, namun secara umum RS ini masih tergolong baru, sehingga masih tipe C. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk terus melakukan upaya peningkatan,” tutur Gatot.

Politisi F-Golkar itu pun meminta kepada pihak Jasindo untuk dapat meningkatkan provider untuk peserta Jamkestama yang sesuai dengan standar seperti di dalam UU Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jamkestama.

“Meskipun masih ditemukan sedikit kelemahan, kami meminta Jasindo agar dapat memberikan rekomendasi provider yang sesuai dengan standar yang sudah diatur di dalam UU. Tentunya hal ini harus didorong, agar peserta Jamkestama dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya di kesempatan yang

sama, Kepala Perawat Astro Sagala Head Nurhidayati menuturkan, RS Grha Medika akan terus meningkatkan fasilitas dan memaksimalkan pelayanan. Tidak hanya untuk Anggota DPR ataupun Pejabat, pelayanan terbaik juga diberikan kepada masyarakat baik peserta BPJS Kesehatan maupun non BPJS.

“Karena kami masih tergolong baru, fasilitas yang tersedia masih terbatas. Ruang VVIP dan Eksekutif yang kami miliki saat ini hanya berjumlah 1 ruangan. Sementara untuk ruangan VIP yang kami miliki sebanyak 18 ruangan. Oleh karena itu, ke depan akan kami dorong untuk ditingkatkan, dan tentunya juga terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.

Kunjungan kerja BURT DPR RI ini turut diikuti oleh Wakil Ketua BURT DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan) dan Hasrul Azwar (F-PPP), serta sejumlah Anggota BURT DPR, diantaranya Muhammad Rakyhan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Sartono Hutomo (F-PD), dan Fauzih H. Amro (F-Hanura). ■ (tra/sf)

Tinjau Pembangunan Jembatan Teluk Kendari, Komisi V Harap Selesai Tepat Waktu

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Surrato berharap pembangunan Jembatan Teluk Kendari dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini sangat penting guna mengefektifkan roda transportasi di Kendari melalui jembatan yang dibangun dengan biaya Rp825 miliar ini.

“ Saya berharap pembangunan ini tepat waktu, tapi jangan sampai hanya karena mengejar target waktu jadi mengabaikan hal-hal terkait SOP,” ujar Anton, Rabu (14/3) di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Diketahui pembangunan Jembatan Teluk Kendari ini dimulai tahun 2016 dan ditargetkan rampung September 2019. Anton sendiri pun tidak ingin pembangunan diselesaikan dengan buru-buru dengan mengabaikan prinsip keselamatan kerja dalam SOP.

“Pembangunan ini dimulai tahun 2016 dan target selesai 2019. Saya kira

Saya berharap pembangunan ini tepat waktu, tapi jangan sampai hanya karena mengejar target waktu jadi mengabaikan hal-hal terkait SOP



ini yang tercepat dan terpanjang ke 3 se-Indonesia. Tapi saya tidak mau buru-buru. SOP-nya harus ditaati. Jangan sampai karena mengejar waktu sehingga menimbulkan hal yang tak diinginkan,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.

Meski demikian, selama pembangunan Jembatan Teluk Kendari ini tidak ditemukan adanya kecelakaan kerja. Anton pun mengingatkan agar kontraktor tetap merujuk pada SOP yang telah ditetapkan. “Sejauh ini tidak ada kecelakaan. Kita doakan ini tepat waktu dan tidak melanggar SOP,” tutup Anton.

■ (hs/sc)



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Surrato meninjau pembangunan Jembatan Teluk Kendari

Polri Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada

Polri diimbau harus mampu mengantisipasi kerawanan sosial di tengah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tak terjadi konflik horizontal.



foto: edoeh/od

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding saat mengikuti rapat kerja Komisi III dengan Kapolri,

di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). “Saya menghargai Kapolri sudah melakukan pemetaan kerawanan wilayah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Ini harus jadi perhatian dan sedapat mungkin kamtibmas sebagai ujung tombak perlu diberdayakan untuk mendeteksi dini dan deteksi aksi ketika muncul masalah-masalah yang berpotensi konflik horizontal,” paparnya.

Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada Serentak 2018. Di daerah ini, ungkap Sudding, ada lima pasang calon bupati. Satu calon yang didukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat. Empat pasang calon lainnya dari jalur independen malah diloloskan. Ini tentu berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Di Mimika tingkat kerawanannya masuk ranking pertama. Calon *incumbent* yang didukung semua partai politik justru malah digugurkan. Sementara calon perseorangan ada empat pasang diloloskan. Ini bisa saja pihak penyelenggara pilkada ikut bermain. Sedapat mungkin ini harus diantisipasi,” harap anggota F-Hanura tersebut.

Dia juga mengungkap kasus penembakan yang menimpa calon bupati di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kasus penyerangan terhadap para calon peserta Pilkada harus menjadi perhatian serius Polri.

“Ini ancaman dalam pelaksanaan Pilkada. Anehnya, pelaku penembakan sudah ditahan tapi dilepas kembali oleh Polres setempat,” ungkap Sudding bertanya-tanya. ■ (mh/sc)

Komisi IX dan US-ASEAN Business Council Diskusi Regulasi Produk Halal

Komisi IX DPR RI memaparkan regulasi produk halal saat menerima kunjungan US-ASEAN Business Council. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin diskusi mengatakan, dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika ada produk yang mengandung bahan baku yang tidak halal, harus dicantumkan dalam kemasan produknya.

“Pertama yang mereka tanyakan itu soal produk halal. Jadi ada beberapa produk misalnya MW, J&J itu kan banyak memproduksi produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu aturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu kan mengamanatkan,

jika ada produk yang tidak halal harus mencantumkan merek yang tidak halal itu,” papar Saleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Saleh menjelaskan, berkaitan dengan aturan produk halal merupakan wilayah kerja Komisi VIII DPR. “Kita mengatakan, kalau isu tentang halal itu persisnya bukan

di Komisi IX, tapi di Komisi VIII. Tetapi, kita juga bisa menekankan hal ini di Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk dibicarakan di tingkat internal pemerintah, agar ada solusi yang baik antara industri dengan agama. Dalam hal ini, konteks halal bisa dipertemukan,” jelas Saleh.

Politisi Fraksi PAN itu menambahkan, kedua belah pihak diharapkan saling memahami agar undang-undang bisa dipatuhi, tetapi industri juga tetap jalan. Ke depan akan dicarikan solusi untuk menjawab persoalan tersebut.

“Industri jalan tanpa melanggar



Siaran Asian Games Harus Mendapat Prioritas

Perhelatan olahraga bangsa-bangsa Asia tinggal beberapa bulan lagi. Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games 2018 dituntut mampu menyelenggarakan event ini dengan sangat baik. Dan salah satu kesuksesan Asian Games ditunjang dari mutu siaran TVRI sebagai televisi publik milik pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra saat mengikuti rapat dengan pendapat dengan Dirut TVRI Helmi Yahya, mengatakan, karena menyangkut marwah bangsa ini, siaran Asian Games yang ditayangkan TVRI harus mendapat prioritas, termasuk ketika TVRI mengajukan revisi anggaran untuk menunjang mutu siarannya. Revisi anggarannya hanya sebesar Rp11 miliar lebih.

“Kalau masih memungkinkan bila angkanya Rp11 miliar, kita lapor pada Menteri Keuangan saja, karena ASIAN Games ini prioritas. Jadi operasional jalan dan ASIAN Games juga jalan,” kata anggota F-Nasdem itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Asian Games, lanjutnya, mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah dan DPR. Karenanya, usulan Dirut TVRI agar Komisi I menyetujui revisi anggaran 2018 untuk menunjang siaran Asian Games ini perlu didukung.

“Karena menyangkut marwah dan martabat negara, saya pikir ini kita terima



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra berdialog dengan Dirut TVRI

Foto: ariief/od

dengan catatan anggaran pengadaan kendaraan harus diajukan pada tahun berikutnya. Kalau cuma Rp11 miliar dan

masih memungkinkan kita usulkan saja pada Menteri Keuangan. Rp11 miliar tidak terlalu besar,” tutup Supiadin. ■ (mh/sc)



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menerima kunjungan US-ASEAN Business Council

Foto: Azhar/od

undang-undang dan tetap menjalankan undang-undang yang ada. Jadi mereka minta bagaimana caranya agar industri tetap jalan, tetapi undang-undang itu tidak dilanggar,” ujar Saleh.

Selain itu, mereka juga mengatakan di Indonesia bukan hanya bisnis. US-ASEAN Business Council juga melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

“Ada kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan di berbagai daerah di Indonesia, dan tentu itu sangat baik sekali mereka laporkan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita tahu mereka melakukan kewajiban. CSR merupakan kewajiban yang harus dilakukan,” papar Saleh. ■ (eko/sf)



Suasana pertemuan Plt Setjen DPR Damayanti dengan Anggota DPRD Blitar

Foto odji/cd

Setjen DPR Sarankan DPRD Blitar Revisi Tatib Mekanisme Reses

Penjadwalan reses yang tidak teratur menjadi salah satu masalah yang sering disampaikan DPRD, baik Tingkat I atau II saat berkunjung ke DPR. Hal itu pula yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kepada Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti. Melihat hal ini, Maya demikian sapaan akrabnya menyatakan perlu dilakukan perubahan tata tertib mekanisme reses.

“Dari hasil pertemuan ini, memang kalau yang kami lihat belum terpolanya mekanisme reses di DPRD Kabupaten Blitar. Untuk itu, kita harus membuat peraturan yang menaungi pengalokasian reses itu sendiri, supaya selebihnya nanti akan lebih mudah,” kata Maya usai menerima audiensi DPRD Blitar di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3).

Maya menambahkan, tidak adanya

peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme reses, membuat jadwal kunjungan kerja anggota dewan ke daerah pemilihannya menjadi tidak teratur. Tidak jarang, kunjungan yang seharusnya dilakukan pada masa reses, dilakukan pada saat masa sidang. Hal ini tentunya akan menyulitkan Sekretaris Dewan dalam mengatur anggaran.

“Kalau kegiatan reses dikerjakan di waktu sidang, nanti Sekretaris Dewan juga akan kebingungan, karena anggaran

yang harusnya turun di masa reses ternyata harus diajukan ke masa sidang,” jelas Maya.

Untuk itu, Maya menyarankan DPRD Blitar agar segera merevisi tata tertib terkait mekanisme reses, sehingga kedepannya akan memudahkan anggota dewan beserta jajarannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai representasi rakyat di daerah pemilihannya.

Menanggapi saran tersebut, Sekretaris Dewan DPRD Blitar Izul Marom akan mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan ini. “Kita sudah belajar dari DPR. Jadi setelah ini saya dan teman-teman yang ikut hadir di sini akan mempelajari teknisnya agar segera kami tidaklanjuti,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Blitar Suwito, Wakil Ketua DPRD Blitar Sugianto, Sekretaris Dewan Izul Marom, dan 20 Anggota DPRD Blitar lainnya. Pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah mengenai perkembangan revisi UU MD3. ■ (apr/sf)



Capai Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan

Memperingati Hari Perempuan Internasional, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai goal nomor lima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Demikian mengemuka dalam Peringatan International Women's Day dengan mengangkat tema "Time is Now, Leadership by Example" di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yesimbe, serta anggota DPR lainnya dan 25 Duta Besar dari negara sahabat.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, bahwa tidak ada persaingan antara laki-laki dan perempuan tetapi masing-masing bisa berperan untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Nurhayati dalam sambutannya.

Ia menekankan kesetaraan gender sangat penting karena separuh potensi dunia ada di perempuan. Mengingat, 50 persen populasi dunia adalah perempuan. "Tidak saja karena itu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menciptakan

laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama melangsungkan kebaikan dan kebajikan," papar Nurhayati.

Nurhayati menambahkan, kesetaraan gender bukan hanya isu yang dimiliki kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki. Ia menilai, dukungan kaum pria sangat penting untuk terus meningkatkan peran perempuan, yaitu bagaimana lelaki bisa memberikan ruang serta mengangkat hak perempuan. "Kita masih menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar korban konflik kekerasan, perdagangan manusia dan diskriminasi gender adalah perempuan," sambungnya.

Selain itu, ia melanjutkan, perempuan lebih cenderung memilih penyelesaian damai dalam menyelesaikan suatu konflik. Tak hanya itu, akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk demokrasi. Namun, faktanya representasi global perempuan dalam politik masih kurang dari 20%.

Menyadari hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI sendiri telah memberikan

penekanan kuat pada poin SDGs. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Karena itu, partisipasi perempuan yang setara dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan perlu dipromosikan di semua tingkat.

"Kami perempuan Indonesia masih membutuhkan dukungan, dari para pemangku kepentingan juga khususnya. Tidak saja di dalam legislatif tetapi eksekutif dan yudikatif, tapi di semua lini kehidupan bermasyarakat," ia menandaskan.

Memeriahkan perayaan International Women's Day kali ini, DPR memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menempatkan kaum perempuan terbanyak dalam kabinet kerjanya. DPR juga memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Republik Indonesia.

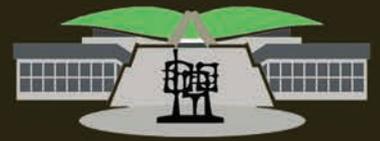
Kemudian, kepada DPRD Provinsi Riau karena memiliki jumlah anggota DPRD perempuan terbesar secara nasional. Sedangkan, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Parantu dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti diberikan penghargaan atas pencapaian mereka sebagai Bupati Perempuan yang terpilih selama dua periode berturut-turut.

■ (ann/sc)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Indonesia

Foto: Jaka/oci



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendampingi Delegasi Ketua Parlemen Kazakhstan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (13/3) FOTO: NAEFUROJI



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri Peringatan International Women's Day tema "Time is Now, Leadership by Example" dihadiri anggota DPR lainnya dan 25 Duta Besar dari negara sahabat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3) FOTO: JAKA/KRESNO



Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir memimpin rapat kerja dengan Kapolri membahas pengamanan pilkada dan isu-isu aktual, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). FOTO: SUPARDI